

9

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM PARTISIPASI
METODE PRIA DI KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN
KARANGANYAR**

Apta Fairuz Syahadiva, Dyah Lituhayu, Titik Djumiarti
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

ABSTRACT

The male family planning program is an alternative for people who cannot participate in the female family planning program and to overcome the problem of population explosion in Indonesia. The participation of men in Karanganyar Regency is quite good, which is above 5%, while in Jatipuro District it is quite low, which is below 5%. Departing from these problems, this research aims to evaluate and socio-cultural factors of the family planning program in the participation of men's methods in Jatipuro District, Karanganyar Regency. This research uses descriptive qualitative method with snowball sampling technique. The results of research that the role of government agencies in the success of the male family planning program was good can be seen from William Dunn's indicators, that is, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. Community participation in Jatipuro Subdistrict, Karanganyar Regency itself is still minimal due to social factors in term of the perception and cultural factors in term of knowledge of the community to the role of family. Therefore, the male family planning program is considered not successful in achieving the goal of increasing male participation. The government should strive to promote through community activities such as wayang kulit, community service and others, try to make new breakthroughs in contraceptives and society especially men who have participated as agents of change in providing motivation to men who have not participated in the family planning program.

Keywords: Program Evaluation, Male Family Planning, Vasectomi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk yang terus bertambah dan persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan kependudukan di Indonesia. Maka dari itu untuk mengatasi persoalan kependudukan tersebut, pemerintah mencanangkan suatu program yakni program Keluarga Berencana (KB).

Program KB merupakan program berskala nasional yang dibuat untuk mengatasi ledakan penduduk dan menekan angka kelahiran di Indonesia. Program ini dirancang untuk menjaga kestabilan penduduk, memajukan sebuah negara, mensejahterakan ekonomi dan sosial dalam suatu negara. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan dalam program KB, antara lain yakni mengatur kelahiran anak, mengatur kehamilan, melakukan promosi mengenai program KB, mengatur jarak dan usia ideal melahirkan, melakukan perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Program KB ini tak hanya pemerintah saja yang bergerak tetapi juga

perlu adanya partisipasi dari masyarakat agar dapat mewujudkan program KB yang berjalan dengan baik. Jika kerjasama antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik maka dapat mewujudkan program yang dapat meningkatkan kualitas dan mensejahterakan masyarakat.

Alat kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam menangani permasalahan pertumbuhan penduduk. Alat kontrasepsi ini akan menghindari “4T” yaitu terlalu banyak anak, terlalu dekat dengan jarak kelahiran, terlalu tua dan terlalu muda. Ada beberapa alat kontrasepsi, antara lain pil KB, implan, MOW, IUD, suntik, kondom dan MOP.

Tabel 1. 1

Partisipasi Pria di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021

TAHUN	MOP	KONDOM
2021	22.107	146018
2020	25.658	133.920
2019	30.165	123.807
2018	32.886	115.149
2017	47.399	135.403

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Program KB di Provinsi Jawa Tengah didominasi dengan partisipasi wanita dengan persentase antara 96% sampai dengan 96.8% dan partisipasi pria dengan persentase antara 2.9% sampai

dengan 4.5%. Partisipasi pria di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh penggunaan kondom yang memiliki partisipasi antara 2.4% sampai dengan 3.2% dan MOP memiliki partisipasi kurang dari satu persen (0.49% sampai dengan 0.83%).

Tabel 1. 2

Partisipasi Pria di Kabupaten Karanganyar 2017-2021

TAHUN	MOP	KONDOM
2021	987	5.066
2020	1.026	4.179
2019	1.056	4.446
2018	1.226	4.106
2017	1.139	4.116

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Akhir Tahun (DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)

Partisipasi KB pria pada tahun 2017-2021 di Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan partisipasi KB wanita, hal ini dapat dilihat partisipasi KB wanita yang memiliki partisipasi antara 94.7% sampai dengan 96.3% sedangkan partisipasi KB pria memiliki partisipasi antara 3.7% sampai dengan 5.3%. Partisipasi KB pria lebih didominasi dengan metode kondom yang memiliki partisipasi antara 2.9% sampai dengan 4.5% dan metode KB MOP

dengan partisipasi 0.7% sampai dengan 1%.

Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi pria di atas partisipasi di Provinsi Jawa Tengah yakni 4.5% sedangkan Kabupaten Karanganyar 5.3% yang didominasi oleh partisipasi kondom sebanyak 4.5% dan di Jawa Tengah sebanyak 3.2%, sedangkan partisipasi KB MOP di Jawa Tengah dibawah 1% dan di Kabupaten Karanganyar berkisar 1%.

Tabel 1. 3

Partisipasi Pria di Kecamatan Jatipuro 2017-2021

TAHUN	MOP	KONDOM
2021	5	164
2020	7	199
2019	11	130
2018	6	149
2017	6	151

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Akhir Tahun (DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)

Rendahnya partisipasi KB pria di Kecamatan Jatipuro pada tahun 2017-2021 dilihat dari partisipasi KB wanita yang memiliki partisipasi lebih mendominasi antara 95.8% sampai dengan 97.8% sedangkan partisipasi KB pria memiliki partisipasi yang lebih rendah antara 2.2% sampai dengan 4.2% yang mana partisipasi KB pria dibagi

menjadi dua metode KB yakni partisipasi kondom yang memiliki lebih banyak partisipasi antara 1.61% sampai dengan 3.23% dan MOP (vasektomi) yang memiliki partisipasi kurang dari satu persen (0.08% sampai dengan 0.13%).

Kecamatan Jatipuro memiliki partisipasi yang masih rendah yakni 4.2% sedangkan di Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi 5.3% yang didominasi oleh partisipasi kondom sebanyak 4.5% dan di Kecamatan Jatipuro sebanyak 3.23%, sedangkan untuk KB MOP di Kecamatan Jatipuro masih dibawah 1% dan di Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi sebanyak 1%.

Alat kontrasepsi kebanyakan dibuat untuk wanita karena kehamilan memiliki resiko yang tinggi yaitu kematian. Maka dari itu perlunya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan melalui program Keluarga Berencana. Pria tidak mengalami resiko seperti itu, maka dari itu urgensi alat kontrasepsi pada pria dan perempuan tidak bisa seimbang. Peran serta pria dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami dan istri

mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan KB. Selanjutnya dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 2 yang menjelaskan pemerintah juga harus membantu dalam menyediakan pelayanan alat kontrasepsi bagi suami dan istri. Tak hanya itu, partisipasi pria juga diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2d) yang menjelaskan mengenai tujuan program KB yang memerlukan peningkatan partisipasi pria dalam program KB. Hal ini menjelaskan bahwa program KB tidak hanya untuk wanita saja, tetapi peran pria juga menjadi salah satu kunci keberhasilan program KB.

BKKBN menambahkan bahwasannya partisipasi pria sangat penting dikarenakan pria merupakan rekan dari wanita dalam melakukan reproduksi dan hubungan seksual yang mana hal ini nantinya menjadi tanggung jawab bersama-sama. Menurut Sukarno dalam Nindita (2019:25) menjelaskan bahwa program KB belum maksimal dikarenakan adanya pandangan masyarakat dan faktor sosial budaya.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka peneliti melihat perlu dilakukannya evaluasi terhadap program KB dikarenakan untuk menilai program yang sudah berjalan sangat lama tapi partisipasi pria sampai saat ini masih tergolong rendah. Maka dari itu timbul pertanyaan penelitian yaitu “apakah pelaksanaan program oleh pemerintah sudah mampu meningkatkan kesadaran pria untuk mensukseskan partisipasi metode pria?”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana faktor sosial dan budaya pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui evaluasi program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
2. Mengetahui faktor sosial dan budaya pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode

pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ketika seseorang dan sumber daya melakukan suatu proses yang kemudian diformulasikan, diimplementasikan lalu dikelola keputusan tersebut dalam kebijakan publik. Administrasi publik juga termasuk science and art yang mempunyai kegunaan untuk melaksanakan kebutuhan yang telah direncanakan (Chandler dan Plano dalam Keban, 2019:3).

Menurut Keban (2019:5) administrasi publik merupakan konsep yang mengarah ke dalam penguatan terhadap masyarakat dengan cara mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian yang dalam hal ini para birokrat memberikan hak penuh untuk masyarakat untuk lebih berkembang ke arah pemberdayaan yang berupaya untuk memfasilitasi agar mampu mengatur hidup secara lebih mandiri. Hal ini pada akhirnya memungkinkan masyarakat untuk memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam menentukan kebutuhan hingga tahap pelaksanaan dan tahap hasil

evaluasi, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Nicholas Henry dalam Keban (2019:6) mengatakan administrasi publik merupakan hal yang kompleks dari gabungan sebuah praktik dengan teori yang mempunyai tujuan dalam memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar kebutuhan masyarakat dapat didorong dengan adanya kebijakan publik.

Beberapa penjelasan mengenai definisi administrasi publik dapat disimpulkan bahwa administrasi publik yaitu beberapa kelompok maupun organisasi yang bekerja sama dalam melaksanakan perintah atau aturan dari pemerintah agar lebih efisien dan efektif dalam mencapai sebuah tujuan.

2. Evaluasi Kebijakan

William Dunn (2003:608) menjelaskan mengenai evaluasi yakni suatu hal yang berhubungan dengan aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang dapat menyatakan usaha untuk menganalisis hasil dari kebijakan maupun

program. Pengertian yang lebih spesifik yakni evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi program menurut Sukardi dalam Tri Yulinda (2019:19) yakni tahapan dimana mencari informasi kemudian dianalisis menjadi suatu kegiatan luas dan komprehensif yang nantinya untuk mengambil keputusan terkait dengan program yang dinilai. Wujud dari evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan.

Suharsmi Arikunto dalam Muhammad Firyal dan Widya (2018:38) menjelaskan mengenai evaluasi program yang merupakan suatu proses penetapan secara sistematis mengenai tujuan, nilai dan kecocokan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Proses penetapan tujuan tersebut dilakukan dengan perbandingan yang hati-hati terhadap data yang sudah diobservasi dan telah menggunakan standard yang sudah dibakukan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, evaluasi program merupakan kegiatan mengumpulkan informasi agar dapat mengetahui apakah program yang

sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum.

3. Indikator Evaluasi Kebijakan

Suatu kriteria diperlukan untuk mengukur keberhasilan dalam suatu program. Evaluasi kebijakan yang sudah dijelaskan oleh William Dunn dalam Nugroho (2003:186) memiliki enam indikator evaluasi, yaitu:

- a. *Effectiveness* (Efektivitas), menjelaskan mengenai kebijakan yang berjalan sudah sesuai dengan tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dan dapat mencapai hasil yang diinginkan.
- b. *Efficiency* (Efisiensi), menjelaskan mengenai usaha yang diperlukan dapat diamati dari sumber daya yang sudah dimiliki dalam melakukan suatu tujuan efektivitas tertentu.
- c. *Adequacy* (Kecukupan), menjelaskan mengenai suatu alternatif yang dapat mewujudkan kebutuhan yang dipermasalahkan secara maksimal.
- d. *Equity* (Pemerataan), menjelaskan kriteria yang dapat terpenuhi apabila kebijakan atau program dapat menciptakan distribusi yang adil dan wajar untuk kelompok sasaran.
- e. *Responsiveness* (Responsivitas), menjelaskan tanggapan dari masyarakat maupun pemerintah mengenai kebijakan atau program yang sudah berjalan tersebut sudah memuaskan dan sesuai dengan nilai-nilai dalam suatu kelompok masyarakat.

4. Faktor Sosial dan Faktor Budaya

Faktor sosial merupakan dimana nantinya setiap orang di dalam kehidupan sehari-hari akan selalu bersosialisasi dengan orang lain. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Kotler (2012:175-177) menjelaskan faktor sosial yang meliputi:

- a. Keluarga memberikan pengaruh yang kuat hal ini dikarenakan terdapat keterlibatan dari orang tua, anak atau keluarga terdekat/saudara dalam melakukan suatu aktivitas.
- b. Peran dan status merupakan kedudukan seseorang dalam kelas sosialnya, sehingga dapat memengaruhi status sebagai cerminan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat.
- c. Kelompok referensi merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang baik secara langsung maupun tidak

langsung. Seseorang dalam kelompok referensi dapat melakukan perbandingan sikap atau perilakunya dengan kelompok sendiri.

Faktor budaya merupakan bentuk nilai, kebiasaan, simbol yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang, sikap, pemikiran dan kepercayaan seseorang (Peter dan Olson, 2014:70). Faktor budaya meliputi (Kotler, 2012:173-177):

- a. Kelas sosial merupakan bagian yang terdapat di masyarakat yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun secara hierarkis dalam kelas sosial yang sama nilai, minat dan tingkah laku anggotanya juga akan sama.
- b. Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar karena hal ini berawal dari pemikiran ataupun kegiatan yang dianggap wajar oleh masyarakat hingga membentuk suatu kebiasaan yang sulit dirubah.
- c. Sub-budaya merupakan bagian dari budaya yang memiliki cakupan lebih sempit karena terpisah oleh sistem nilai. Sub-budaya terdiri dari agama,

kelompok, ras, wilayah geografis dan kebangsaan.

5. Program Keluarga Berencana

World Health Organization menjelaskan bahwa program KB merupakan program yang memiliki tujuan dalam membantu pasangan suami istri menghindari kelahiran anak yang tidak perlu, menjaga jarak kehamilan pertama dengan kehamilan selanjutnya, menentukan waktu kelahiran dan agar bisa menentukan berapa jumlah yang diinginkan dalam keluarga tersebut.

Program KB digerakkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Manfaat program KB menurut WHO adalah perlambatan pertumbuhan penduduk, mengurangi kehamilan remaja, mencegah kesehatan terkait dengan kehamilan, membantu mencegah HIV/AIDS, dan mengurangi angka kematian bayi.

Terdapat dua sasaran dalam program KB, yaitu langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini sasaran langsung yakni Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki tujuan agar angka kelahiran menjadi menurun yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi berkelanjutan, sedangkan sasaran tidak

langsung yaitu menurunkan angka kelahiran dengan cara pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Penelitian dilakukan di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, PLKB Kecamatan Jatipuro, Puskesmas Kecamatan Jatipuro, PPKBD wilayah Kecamatan Jatipuro dan Kecamatan Jatipuro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Effectivness (Efektivitas)

a. Sasaran Program

Terdapat penurunan dalam partisipasi program KB pria yang memiliki partisipasi dibawah 5%. Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang mengatakan bahwa peningkatan kesertaan KB pria dengan target capaian kinerja 33% dan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 2f yang berbunyi pelayanan kepesertaan KB dan

kesehatan reproduksi terdiri dari peningkatan peran serta pria, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi pria masih jauh dari target yang sudah dijelaskan dalam peraturan tersebut. Peningkatan pelaksanaan program dijelaskan oleh informan yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahun hanya ada satu partisipan yang bergabung dalam program MOP.

b. Pencapaian Tujuan Program

Berdasarkan temuan yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara dengan berbagai informan, tujuan dari program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar yakni meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pria.. Adanya program KB pria merupakan alternatif bagi wanita/istri yang tidak bisa berpartisipasi dalam program KB. Akan tetapi, program KB pria dinilai cukup efektif dalam mencegah kehamilan dikarenakan kehamilan bisa terjadi ketika sperma membuahi sel telur, apabila sperma tidak sampai ke sel telur maka proses pembuahan tidak terjadi. Program KB pria memiliki dua metode yakni KB MOP dan KB kondom. MOP dinilai efektif karena bersifat permanen. MOP

sendiri dilakukan dengan cara operasi bedah minor yang mana saluran sperma dari testis akan dipotong dan diikat guna mencegah sperma keluar saat berhubungan seksual. Sedangkan kondom merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki. Namun di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dinilai masih rendah yakni dengan partisipasi sebanyak 5% yang mana lebih dominan metode kondom daripada MOP. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang mengatakan bahwa target capaian kinerja 33% dalam partisipasi KB pria. Partisipasi pria dalam program KB diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan penanganan masalah kesehatan reproduksi yang dapat memberikan dampak penurunan angka kematian bayi dan ibu. Partisipasi pria merupakan partisipasi yang penting dalam program KB dikarenakan pria merupakan pasangan dari perempuan dalam reproduksi maupun hubungan seksual, sehingga dapat dikatakan bahwa

pria dan wanita harus berbagi tanggungjawab. Pria tidak boleh menekankan maupun membebankan bahwa program KB hanya untuk wanita saja.

c. Waktu untuk Mencapai Tujuan Program

Program KB dalam partisipasi pria memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasinya. Peningkatan partisipasi pria ini merupakan kegiatan dalam program peningkatan kesertaan keluarga berencana yang dituangkan dalam Renstra DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Rencana Strategis dalam waktu lima tahun). Sudah tiga tahun program kegiatan tersebut dilaksanakan, tetapi di lapangan menjelaskan bahwa partisipasi pria masih rendah yakni kurang dari 5% yang kemudian dibagi menjadi dua yakni partisipasi dalam MOP dan partisipasi dalam kondom. Partisipasi alat kontrasepsi kondom memiliki lebih banyak peminat jika dibandingkan dengan MOP. Hal ini dikarenakan kondom lebih mudah digunakan dan ditemukan, sedangkan MOP harus dilakukan dengan metode operasi.

d. Strategi dalam Pelaksanaan Program

DP3APPKB Kabupaten Karanganyar memiliki strategi dalam meningkatkan partisipasi pria yakni dengan pembentukan Paguyuban Prio Utomo yang merupakan organisasi masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam program KB MOP. Anggota dari Paguyuban Prio Utomo nantinya menjadi pembicara dalam acara/sosialisasi KB. Hal ini dikarenakan guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat pria.

PLKB Kecamatan Jatipuro memiliki strategi dengan melaksanakan sosialisasi setiap sebulan sekali di Balai Desa.

Puskesmas Kecamatan Jatipuro melaksanakan Safari KB yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Safari KB merupakan program pelayanan mengenai KB kepada masyarakat, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung.

PPKBD Kecamatan Jatipuro sama dengan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yakni mengundang masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam KB MOP.

Strategi lain yakni Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan *reward* kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam KB MOP yakni sebanyak Rp 1.500.000 dan dari desa juga memberikan *reward* sebanyak dana desa yang sudah dipersiapkan. Terdapat peran komandan TNI dalam memberikan instruksi kepada anggota lain agar dapat berpartisipasi dalam KB MOP.

2. Efficiency (Efisiensi)

a. Biaya Pengelolaan Program

Pelayanan program KB dalam partisipasi metode pria kondom tersedia gratis di Puskesmas Kecamatan Jatipuro atau dapat dijumpai di apotek/toko. MOP sendiri di Kabupaten Karanganyar merupakan program yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau kata lainnya MOP dapat dilakukan dengan gratis. MOP digratiskan/dibiayai oleh pemerintah berguna untuk menarik minat masyarakat agar dapat berpartisipasi tanpa memikirkan biaya. Biaya yang dikenakan dalam MOP tergantung teknik apa yang akan digunakan. Informan dari DP3APPKB Kabupaten Karanganyar mengatakan bahwa MOP di Kabupaten Karanganyar

menggunakan metode VTP yang dikenakan biaya Rp 350.000.

3. Adequacy (Kecukupan)

a. Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya manusia.

Pelaksanaan program KB di Kecamatan Jatipuro dibantu oleh beberapa lembaga pemerintah yakni PLKB Kecamatan Jatipuro, PPKBD dan sub-PPKBD wilayah Kecamatan Jatipuro.

PLKB mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat kecamatan. PPKBD mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa, sedangkan sub-PPKBD mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat dusun.

Program KB memiliki sumber daya manusia yang dapat dilihat dari sasaran partisipasi program yang kemudian dibagi menjadi dua yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsung program KB adalah PUS atau Pasangan Usia Subur yang mempunyai tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi berkelanjutan. Sasaran tidak langsung adalah pengelola KB yang memiliki

tujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan dalam rangka mencapai keluarga yang lebih berkualitas dan keluarga sejahtera.

Paguyuban Prio Utomo merupakan komunitas yang terbentuk dari gabungan akseptor KB MOP. Paguyuban ini dibentuk untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan program KB.

Upaya pencapaian tujuan program.

DP3APPKB Kabupaten Karanganyar mempunyai program yakni KIE melalui media cetak, penyuluhan, kapung KB dan sosialisasi. Koordinasi bersama stakeholders, koordinasi antar masyarakat (PKK), koordinasi bersama organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, MTA), koordinasi bersama organisasi wanita (GOW, Muslimat NU, Aisyah Muhammadiyah dan Salimah), kerja sama dengan TNI/Polri.

PLKB Kecamatan Jatipuro mempunyai program sosialisasi yang diadakan sebulan sekali di Balai Desa, pembagian *leaflet* dan pemasangan brosur di fasilitas kesehatan.

Puskesmas Kecamatan Jatipuro mempunyai program Safari KB yang diadakan sebulan sekali di halaman puskesmas. Safari KB merupakan pelayanan dan penyuluhan mengenai KB.

PPKBD wilayah Kecamatan Jatipuro memiliki program yakni sosialisasi di pertemuan bapak-bapak, sosialisasi bersama kader dan kunjungan ibu nifas.

Ketersediaan reward. *Reward* diberikan untuk memotivasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam KB MOP. *Reward* yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar Rp 1.500.000 dan desa juga memberikan sesuai dengan kemampuan dana desa masing-masing.

Fasilitas. Alat kontrasepsi disediakan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang kemudian disalurkan ke Puskesmas Kecamatan Jatipuro. Fasilitas lain yang diberikan adalah pendampingan bagi calon akseptor KB MOP dari awal hingga pasca MOP dan pelaksanaan KB MOP diadakan setiap hari Senin di RSUD Kabupaten Karanganyar. Terdapat dana ayoman (dana komplikasi Rp 1.500.000 dan dana kegagalan Rp 2.500.000) dan dana BOK (dana jasa medis pelayanan, dana

pengganti tidak bekerja selama tiga hari dan dana konsumsi) dengan besaran Rp. 703.500.

4. Equity (Pemerataan)

a. Luasnya Jangkauan Program

Program KB dalam partisipasi metode pria sudah merata karena sudah menjangkau seluruh desa di Kecamatan Jatipuro. PLKB Kecamatan Jatipuro sudah menjangkau masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi rutin yang diadakan sebulan sekali di Balai Desa. Untuk mensukseskan program kegiatan dari PLKB Kecamatan Jatipuro juga bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan Puskesmas Kecamatan Jatipuro, PPKBD dan sub-PPKBD wilayah Kecamatan Jatipuro.

PPKBD di wilayah Kecamatan Jatipuro juga bekerjasama dengan PLKB Kecamatan Jatipuro dan Puskesmas Kecamatan Jatipuro. Untuk mencakup seluruh desa di wilayah Kecamatan Jatipuro, PPKBD kemudian membentuk sub-PPKBD yang bertugas di dusun-dusun wilayah Kecamatan Jatipuro. Hal ini bertujuan agar program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh di tiap desa wilayah Kecamatan Jatipuro.

b. Pemerataan Pelayanan Partisipasi Pria

Program KB dalam partisipasi metode pria yang kemudian dibagi menjadi dua alat kontrasepsi yakni kondom dan MOP. Kondom tidak memiliki prosedur akan tetapi Puskesmas Kecamatan Jatipuro memiliki SOP alat kontrasepsi kondom yang dimana dalam SOP tersebut dijelaskan bagaimana cara pemakaian kondom. Sedangkan MOP diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 pasal 3 yang menjelaskan syarat menjadi peserta KB, dalam syarat tersebut menjelaskan sebagai berikut: peserta KB berstatus PUS, memiliki usia minimal 35 tahun, memiliki anak minimal dua, umur anak yang terkecil minimal 5 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit diabetes. Hal ini sudah sesuai dengan pernyataan beberapa informan yang menjelaskan mengenai prosedur berpartisipasi dalam MOP. Dalam pelaksanaan MOP, DP3APPKB Kabupaten Karanganyar memiliki MoU bersama RSUD Kabupaten Karanganyar terkait dengan waktu pelaksanaan MOP yang dilaksanakan setiap hari Senin di RSUD Kabupaten Karanganyar.

5. Responsiveness (Responsivitas)

a. Respon Pemerintah terhadap Program

Selama pelaksanaan program KB pria belum pernah terjadi permasalahan. Apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan, lembaga pemerintah akan bekerja maksimal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lembaga pemerintah memiliki komitmen yang kuat dan akan mengkomunikasikan permasalahan. Hal ini dilihat dengan adanya dana ayoman yang terbagi menjadi dua yakni dana kegagalan dengan anggaran Rp 2.500.000 dan dana komplikasi dengan anggaran Rp 1.500.000.

b. Respon Masyarakat terhadap Program

Partisipasi pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dinilai masih kurang bagus hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi dan membebankan sosialisasi ini kepada pihak istri.

Minimnya respon masyarakat merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Hal terpenting dalam mensukseskan program KB dalam partisipasi pria tidak hanya dalam bentuk

berpartisipasi secara langsung tetapi juga dapat mengikuti program yang dipersiapkan.

6. Appropriateness (Ketepatan)

a. Kemanfaatan Program yang dirasakan Kelompok Sasaran

Program KB dalam partisipasi metode pria yang dilakukan di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar sudah tepat karena menurut beberapa informan menjelaskan bahwa program KB merupakan program yang tepat dan memiliki tujuan yang jelas. Program KB pria memiliki manfaat yakni program KB jangka panjang yang dapat mencegah kehamilan, tidak memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan alternatif/solusi kepada wanita yang tidak dapat berpartisipasi.

7. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya terhadap pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode pria mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Faktor sosial diambil dengan temuan bahwa terdapat pengaruh keluarga yakni istri yang berpartisipasi dalam program KB dan kurangnya peran pria sebagai kepala keluarga dalam mengkomunikasikan mengenai partisipasi program KB.

Sedangkan faktor budaya diambil dengan alasan bahwa kuatnya persepsi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam metode pria khususnya dalam alat kontrasepsi MOP karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kuatnya persepsi negatif mengenai program KB pria. Masyarakat Kecamatan Jatipuro beranggapan bahwa program KB hanya diperuntukan untuk wanita/istri saja, terdapat anggapan bahwa KB MOP dilarang agama, tidak dapat menghasilkan keturunan, alat kontrasepsi MOP merupakan bentuk pengkebirian, menghilangkan kejantanan pria, mengurangi kenyamanan saat berhubungan seksual, terdapat anggapan bahwa jika pria/suami yang berpartisipasi dalam MOP akan meningkatkan peluang suami tidak setia dan terdapat stigma masyarakat mengenai MOP sebagai “pria takut dengan istri”.

KESIMPULAN

1) Hasil evaluasi program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

a. Efektivitas dapat dilihat dari indikasi sasaran program, pencapaian tujuan program, waktu untuk mencapai tujuan program dan strategi dalam pelaksanaan

program. Keempat indikasi yang diamati tadi dinilai sudah efektif jika dilihat dari peran pemerintah dalam mengupayakan untuk meningkatkan partisipasi pria yang mana kekurangannya adalah peran masyarakat yang masih tergolong rendah dan membuat partisipasi pria belum mengalami peningkatan tiap tahunnya.

b. Efisiensi dapat dilihat dari indikasi biaya pengelolaan program. Biaya pengelolaan program yang dianggarkan untuk program KB pria dinilai sudah efisien hal ini dikarenakan anggaran biaya tadi digunakan untuk dana ayoman (dana kegagalan dan dana komplikasi) dan dan BOK (dana jasa medis pelayanan, dana pengganti tidak bekerja selama tiga hari dan dana konsumsi).

c. Kecukupan dapat dilihat dari indikasi ketersediaan sumber daya yang membahas mengenai sumber daya manusia, ketersediaan *reward*, upaya pencapaian tujuan program dan fasilitas. Dilihat dari kecukupan bahwa ketersediaan *reward*, pencapaian tujuan program dan fasilitas yang diberikan sudah mencukupi dan mendukung untuk mencapai tujuan program. Akan tetapi jika dilihat dari sumber daya manusia

yakni PUS masih mengalami kekurangan dalam partisipasi pria.

d. Pemerataan dapat dilihat dari indikasi luasnya jangkauan program dan pemerataan pelayanan partisipasi pria. Dilihat dari pemerataan bahwa dua indikasi tersebut sudah berjalan dengan merata dan adil di seluruh dusun di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dengan diadakannya sosialisasi sebulan sekali di Balai Desa dan semua calon akseptor mendapatkan pelayanan yang sama.

e. Responsivitas dapat dilihat dari indikasi respon pemerintah dan respon masyarakat terhadap program. Respon pemerintah sudah baik dilihat dari adanya dana ayoman, sedangkan respon masyarakat masih dinilai kurang dikarenakan respon masyarakat terhadap program KB pria memiliki respon yang masih rendah.

f. Ketepatan dapat dilihat dari indikasi kemanfaatan program yang dirasakan kelompok sasaran. Manfaat yang diberikan dari program KB tidak memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan program KB jangka panjang yang merupakan alternatif bagi

wanita yang tidak dapat berpartisipasi dalam program KB.

2) Pengaruh faktor sosial budaya terhadap pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar yang menjadi penyebab partisipasi pria masih rendah. Faktor sosial budaya yang mempengaruhi program KB dalam partisipasi metode pria, yakni merasa program KB tanggung jawab perempuan/istri, pemakaian KB MOP mengurangi kenyamanan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, merasa KB MOP merupakan bentuk pengibirian pria, sebagai bentuk suami takut istri, jika berpartisipasi dalam KB MOP dapat membuat suami tidak setia, kurangnya kesadaran mengenai program KB pria, mengganggu dalam berhubungan seksual, adanya pendapat bahwa dalam agama melarang jika berpartisipasi dalam KB MOP dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program KB khususnya KB pria.

SARAN

1) Pemerintah agar melakukan promosi mengenai alat kontrasepsi pria khususnya MOP yang memiliki

sedikit peminat. Promosi bisa dilakukan saat kegiatan masyarakat yang mengundang banyak masyarakat seperti acara adat wayang kulit/golek, HUT Kabupaten Karanganyar, kerja bakti dan lain-lain.

- 2) Mengupayakan peningkatan respon pria terhadap alat KB khususnya MOP melalui sosialisasi atau KIE yang lebih massif dengan bahasa yang mudah dipahami oleh calon akseptor pria.
- 3) Mengupayakan membuat terobosan baru dengan menciptakan alat kontrasepsi pria, seperti suntik ataupun pil.
- 4) Bagi pria yang sudah berpartisipasi dalam program KB khususnya KB MOP untuk menjadi *agent of change* atau contoh bagi pria yang belum berpartisipasi dalam KB MOP.
- 5) Bagi masyarakat khususnya pria/suami untuk tidak terlalu membebankan program KB untuk wanita/istri, karena program KB tidak dibuat dan bukan tanggung jawab wanita/istri saja melainkan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firyal Muhammad, dan Widya K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Jakarta: Ideas Publishing.
- N. Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- T., Keban, Y. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kotler, Philip. (2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Alih Bahasa: A.B. Susanto. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga.
- Nani, Nindita. (2019). Strategi DP3APPKB untuk Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Program KB di Kabupaten Karanganyar. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Yulinda Dalimunthe, T. (2019). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Anak Jalanan di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*. 1–202.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jateng. (2021). Website: <https://jateng.bps.go.id/>.